

KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK PERTAMAX DAN STRATEGI KEBIJAKANNYA

13

Dewi Restu Mangeswuri

Abstrak

PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax per 1 April 2022. BBM Pertamax dengan kandungan RON 92 naik menjadi Rp12.500 per liter. Penyesuaian harga dilakukan seiring melonjaknya harga minyak mentah dunia di atas USD100 per barel dan agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Tulisan ini mengkaji alasan kenaikan harga BBM Pertamax dan strategi kebijakan yang bisa dipilih oleh pemerintah. BBM Pertamax memang merupakan bahan bakar nonsubsidi, sehingga konsumennya lebih banyak masyarakat menengah ke atas. Namun, kenaikan harga BBM Pertamax yang cukup tinggi berpotensi mendorong konsumen beralih ke BBM Peralite. Hal itu tentu akan berpengaruh pada kemampuan pasokan dan ketersediaan di PT Pertamina (Persero). Dampak lainnya adalah membengkaknya subsidi yang harus ditanggung pemerintah, mengingat BBM Peralite sudah ditetapkan sebagai jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Komisi VI dan VII DPR RI perlu mendesak pemerintah untuk menyusun strategi kebijakan demi menjaga harga bahan bakar minyak tetap stabil.

Pendahuluan

PT Pertamina (Persero) selanjutnya disebut Pertamina resmi menaikkan harga Pertamax per 1 April 2022. Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan kandungan RON (*Research Octane Number*) 92 ini naik menjadi Rp12.500 per liter. Dasarnya adalah Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No.62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan

Bakar Umum. Kebijakan lainnya adalah menetapkan BBM RON 90 atau Peralite sebagai jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Artinya, BBM Peralite dipastikan menjadi jenis bahan bakar yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Sebelumnya, Pertamina menjual BBM Pertamax dengan harga Rp9.000-Rp9.400 per liter. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga *Subholding Commercial & Trading* Pertamina, Alfian Nasution, memastikan harga BBM Pertamax masih kompetitif dibandingkan harga BBM kandungan RON sama pada operator SPBU lainnya



(Kontan, 1 April 2022). Kenaikan ini baru dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Dikatakan, meskipun harga Pertamina naik, pihaknya masih menjual di bawah harga keekonomiannya atau pada kisaran Rp12.000 per liter.

Menurut *Head of Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) Abra PT Talattov, kenaikan harga BBM Pertamina sekitar 38% sebenarnya telah diantisipasi dengan penetapan sebagai JBKP yang menggantikan premium (Kompas, 3 April 2022). Akan tetapi, tetap ada potensi pergeseran cukup signifikan dari BBM Pertamina ke Ptalite. Menurutnya, menuju transisi subsidi tertutup yang paling layak dilakukan pemerintah dalam jangka pendek adalah mengeluarkan regulasi pembatasan pengisian BBM bersubsidi. Misalnya melarang kendaraan bermotor pribadi dengan kapasitas mesin minimal 1.800 cc (silinder) membeli/mengonsumsi BBM Ptalite dan/atau BBM Biosolar. Alasannya, dari sisi keadilan yang lebih menikmati justru kendaraan roda empat pribadi. Regulasi itu setidaknya dapat menahan potensi jebolnya BBM Ptalite. Hal itu tentu akan berpengaruh pada kemampuan pasokan dan ketersediaan Pertamina. Dampak lainnya adalah membengkaknya subsidi yang harus ditanggung pemerintah, mengingat BBM Ptalite sudah ditetapkan sebagai JBKP.

Untuk itu pemerintah perlu menyiapkan mekanisme yang efektif untuk mempertahankan pengguna Pertamina tidak beralih ke Ptalite. Di sisi lain, potensi melonjaknya besaran subsidi BBM juga patut diantisipasi. Mekanisme subsidi saat ini adalah subsidi terhadap produk (barang), bukan orang. Subsidi ini sifatnya

terbuka sehingga tidak ada larangan konsumen kelas menengah atas, atau kendaraan jenis apapun untuk membeli BBM subsidi. Tulisan ini mengkaji alasan kenaikan harga BBM Pertamina dan strategi kebijakan yang bisa dipilih oleh pemerintah.

Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak

Kementerian ESDM mencatat BBM Ptalite adalah BBM jenis bensin/premium yang paling banyak digunakan sepanjang 2021 dengan volume mencapai 23 juta kilo liter. Jumlah tersebut sekitar 79% dari total konsumsi BBM jenis bensin yang juga mencakup Pertamina Turbo, dan Premium. Keberadaan BBM Ptalite saat ini menjadi paling penting karena menjadi tulang punggung bahan bakar bagi masyarakat. Disparitas harga antara BBM Pertamina dan Ptalite dikhawatirkan menyebabkan migrasi konsumsi ke BBM yang lebih murah (Bisnis Indonesia, 4 April 2022). Berkaca pada kisruh distribusi BBM Biosolar, pemerintah dan Pertamina perlu mewaspadaikan agar tidak terjadi kelangkaan BBM Ptalite ke depan.

Kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamina membuat konsumen beralih ke BBM bersubsidi Ptalite. Berdasarkan pengamatan di beberapa SPBU, antrean kendaraan bermotor jalur pengisian Pertamina jauh lebih sepi dari biasanya. Sebaliknya, antrean di jalur pengisian Ptalite tampak ramai. Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyatno berpendapat, pasokan Ptalite perlu dipastikan lancar, terlebih masyarakat sudah diperbolehkan mudik pada lebaran tahun ini. Perlu adanya jaminan pasokan dan distribusi, jangan sampai ada kelangkaan. Pertamina menjamin ketersediaan Ptalite akibat peningkatan permintaan seiring

peralihan tersebut (Republika, 5 April 2022).

Selain berpotensi terjadi peralihan konsumsi BBM Pertamina ke Peralite, Maximilianus Nico Demus, *Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas* menyebutkan kenaikan harga BBM Pertamina dapat meningkatkan inflasi (Media Indonesia, 4 April 2022). Mulai dari pajak pertambahan nilai (PPN) yang naik menjadi 11%, penyesuaian harga BBM, hingga rencana pemberlakuan pajak karbon oleh pemerintah. Kenaikan beberapa harga barang impor, khususnya bahan bakar dan pangan berpotensi mendorong inflasi cukup tinggi tahun ini. Beberapa komoditas pangan, khususnya gandum dan jagung juga akan mengerek inflasi. Kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin paling terdampak dari kenaikan ini. Di antara harga yang meningkat cukup tinggi selama invasi Rusia ke Ukraina ialah minyak mentah, gandum, dan *crude palm oil* (CPO). Ketiga komoditas itu memiliki andil cukup besar pada bobot perhitungan inflasi konsumen. Produk turunan gandum dan minyak sawit sendiri memiliki andil inflasi sekitar 2-3% (Media Indonesia, 5 April 2022).

Dampak inflasi tersebut akan sangat berpengaruh pada rumah tangga miskin, mengingat sekitar 60% dari total pengeluaran mereka digunakan untuk membeli makanan. Dampak inflasi selanjutnya berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin. Jika pendapatan masyarakat yang hampir miskin atau berada di sekitar garis kemiskinan tidak ikut naik, mereka akan menjadi golongan miskin baru. Selain kenaikan harga bahan bakar minyak dan makanan jadi, beberapa faktor yang akan menyumbang inflasi ialah pencabutan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan premium, penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 11% per

April 2022, dan potensi kenaikan harga gandum di pasar dunia.

Alasan Kenaikan Harga BBM Pertamina

Salah satu pendorong kenaikan harga BBM Pertamina adalah harga minyak mentah dunia yang tembus lebih dari USD100 per barel pada Maret 2022 dan masih bertahan hingga saat ini. Direktur *Center of Economic and Law Studies* (CELIOS), Bhima Yudhistira menilai, harga BBM Pertamina sebaiknya ditahan dulu karena masih banyak skema dana kompensasi dari APBN ke Pertamina sebagai cara menahan kenaikan BBM nonsubsidi (Kontan, 1 April 2022). Penggunaan BBM Pertamina akhir-akhir ini cenderung meningkat, bahkan mencapai 21% terhadap total konsumsi bahan bakar. Adapun konsumsi bahan bakar minyak didominasi oleh Peralite sebesar 78%, sementara Pertamina turbo sebesar 1%. Jika dibanding dengan total konsumsi BBM nasional, maka porsi konsumsi BBM Pertamina terus meningkat mendekati 14% (Bisnis Indonesia, 4 April 2022).

Sebelumnya sejumlah pihak mendorong Pertamina untuk segera menaikkan BBM Pertamina. Bahkan Kementerian ESDM telah menetapkan harga keekonomian atau batas atas harga BBM RON 92 pada Maret 2022 mencapai Rp14.562 per liter dan pada April 2022 harga keekonomiannya diprediksi Rp16.000 per liter (Media Indonesia, 4 April 2022). Langkah pemerintah mempertahankan harga BBM Pertamina di bawah harga keekonomiannya dengan alasan untuk menjaga inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno berpandangan bahwa jenis BBM Pertamina ini tidak pantas untuk

disubsidi terus oleh pemerintah, karena dikonsumsi oleh orang mampu dengan kendaraan mewah. Sebaliknya subsidi BBM harus dirasakan masyarakat menengah ke bawah (Media Indonesia, 1 April 2022), sehingga langkah menaikkan harga ini sangat didukungnya.

Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama, menegaskan Pertamina tidak mengharapkan keuntungan yang diambil dari kenaikan harga BBM Pertamax (Media Indonesia, 1 April 2022). Penyesuaian harga dilakukan seiring dengan melonjaknya harga minyak mentah dunia dan agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Keputusan ini tentu sudah melalui berbagai pertimbangan oleh semua pihak terkait. Apalagi, komponen terbesar dari struktur biaya bahan bakar minyak adalah biaya perolehan produk, padahal harga minyak acuan yang digunakan pemerintah untuk menentukan harga BBM domestik ialah *Means of Plants Singapore* (MOPS) terus melonjak akibat konflik geopolitik Rusia dan Ukraina. Komisi VI DPR RI, yang salah satu tugasnya mengawasi sektor badan usaha milik negara (BUMN), mendorong Pertamina untuk segera melakukan penyesuaian harga BBM.

Namun, apabila kebijakan ini bersifat jangka panjang, akan menyebabkan alokasi subsidi BBM semakin naik, dan tentu saja akan membebani APBN, padahal alokasi subsidi BBM dapat dialihkan untuk sektor lain yang

lebih produktif atau untuk mendorong akselerasi pengembangan sektor energi baru terbarukan (EBT). Dengan mempertimbangkan realisasi dan tantangan yang ada, kebijakan subsidi tahun 2022 diarahkan lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya golongan miskin dan rentan.

Strategi Kebijakan BBM

Dalam rangka menjaga stabilitas harga BBM, diperlukan berbagai formulasi strategi kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah diharapkan melanjutkan kebijakan transformasi secara bertahap dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang/penerima manfaat. Kebijakan transformasi subsidi energi ini dilaksanakan dalam rangka menuju skema perlindungan sosial yang menyeluruh. Dengan kebijakan subsidi/bantuan berbasis target sasaran, diharapkan pengelolaan subsidi energi lebih tepat sasaran dan lebih efektif dalam pencapaian sasaran penurunan kemiskinan dan ketimpangan.

Subsidi energi terdiri atas subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg, serta subsidi listrik. Pada periode tahun 2017-2020, realisasi subsidi energi mengalami perkembangan yang cenderung fluktuatif, terutama dipengaruhi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan kebijakan besaran subsidi tetap untuk minyak solar. Berikut ini gambaran subsidi energi periode 2017-2022.

Tabel 1. Subsidi Energi (Rp Triliun)

Jenis	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
BBM dan LPG	47,0	97,1	68,3	47,7	83,7	77,5
Listrik	45,7	48,1	51,7	48,0	47,8	56,5
Total	92,7	145,1	120,0	95,7	131,5	134,0

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022.

Dalam melaksanakan program pengelolaan subsidi energi, pemerintah menghadapi berbagai tantangan, antara lain: (1) masih terjadinya ketidaktepatan sasaran penerima subsidi (*inclusion and exclusion error*); (2) belum optimalnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan subsidi yang diberikan atas barang/komoditas; (3) fluktuasi harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah; serta (4) potensi risiko fiskal yang muncul karena tidak diterapkannya kebijakan penyesuaian harga.

Dalam APBN Tahun Anggaran 2022, pemerintah mengalokasikan total anggaran subsidi sebesar Rp206,9 triliun. Anggaran itu dibagi untuk subsidi energi sebesar Rp134 triliun dan subsidi non-energi Rp72,9 triliun (Kementerian Keuangan, 2022). Oleh karena itu perlu segera diselesaikan upaya peralihan sasaran subsidi, dari sebelumnya berbasis komoditas menjadi berbasis orang. Hal ini harus diiringi dengan perbaikan mekanisme teknis secara operasional sehingga subsidi BBM lebih tepat sasaran.

Menurut Irnanda Laksanawan, *Strategic Advisor dari Centre for Energy and Innovations Technology Studies (CENITS)*, perlu disusun perumusan strategi kebijakan BBM yang terintegrasi antara kepastian pasokan, *price strategy*, sasaran dan mekanisme subsidi, serta insentif, yang diharapkan mampu meminimalisasi dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan gejolak ekonomi nasional (Media Indonesia, 5 April 2022). Contoh kebijakan BBM yang dapat dipilih yaitu kebijakan *formula automatic pricing mechanism (APM)* dalam penetapan harga. Kebijakan formula APM ini dirancang sebagai instrumen yang dapat menstabilkan harga BBM bensin (bensin RON 95, bensin RON 97) dan jenis solar sampai batas tertentu melalui pemberlakuan pajak penjualan

dan subsidi dalam jumlah yang bervariasi. Perubahan harga eceran dipengaruhi oleh besaran pajak dan subsidi dalam batas tertentu sesuai kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan seperti ini telah diambil oleh Malaysia, yang menjaga BBM melalui pemberian insentif.

Selain komponen harga, keamanan pasokan merupakan faktor yang menjadi prioritas perhatian bersama. Upaya membangun infrastruktur cadangan strategis minyak (*strategic petroleum reserves/ SPR*) dalam konteks ketahanan energi nasional harus dilanjutkan. Ketersediaan SPR untuk antisipasi serapan impor dan keadaan darurat. Beberapa negara yang sudah memilikinya antara lain Amerika Serikat, Jepang, dan India. Dalam 6 bulan terakhir, Amerika Serikat sudah melepas 180 juta barel SPR yang berhasil menurunkan harga minyak mentah (Media Indonesia, 5 April 2022).

Penutup

Alasan Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi merupakan penyesuaian terhadap harga minyak mentah dunia yang terus melonjak yang sudah menembus level USD110 per barel. Kenaikan harga BBM Pertamina berpotensi menggiring konsumen mencari alternatif ke BBM Paltalite yang lebih murah. Tanpa pengawasan dalam hal penyaluran yang ketat, hal ini akan memberatkan keuangan negara dan Pertamina.

Beberapa strategi kebijakan yang dapat dipilih antara lain adalah kebijakan transformasi subsidi energi, kebijakan formula APM, serta membangun infrastruktur cadangan strategis minyak mentah dan meningkatkan cadangan operasional BBM harian minimal 30 hari. Sampai

saat ini pemerintah masih menjaga stabilitas harga BBM Peralite, walaupun sudah menaikkan harga BBM Pertamina. Komisi VI dan VII DPR RI perlu melakukan upaya pengawasan terhadap pemerintah agar dapat menyusun kebijakan yang strategis guna menjaga kestabilan harga BBM nasional.

Referensi

“Harga Pertamina Rp12.500/liter Berlaku Hari Ini”, *Media Indonesia*, 1 April 2022, hal. 10.
 “Kenaikan Harga Pertamina, Waspada Migrasi Konsumsi”, *Bisnis Indonesia*, 4 April 2022, hal. 4.

Kementerian Keuangan RI, *Buku II Nota Keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2022*.

“Konsumen Pilih Peralite”, *Kompas*, 3 April 2022, hal. 11.

Laksanawan, Irnanda. “Urgensinya Strategi Kebijakan BBM yang Terintegrasi”, *Media Indonesia*, 5 April 2022, hal. 6.

“Pemakaian BBM Pertamina Mencuil 21% dari Total Konsumen Gasoline”, *Kontan*, 1 April 2022, hal. 1.

“Stok Peralite Dijamin Aman”, *Republika*, 5 April 2022, hal. 18.

“Waspada Inflasi Bergerak Liar”, *Media Indonesia*, 4 April 2022, hal. A2.



Dewi Restu Mangeswuri
dewi.mangaeswuri@dpr.go.id

Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si., menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi pada tahun 2004 dan Magister Akuntansi pada tahun 2006 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain: “Upaya Mengatasi Praktik Kartel di Indonesia” (2019), “Kesiapan Pemerintah Daerah Kota Bandung Jawa Barat dalam Memanfaatkan Teknologi Disruptif bagi Pengembangan Ekonomi Wilayah” (2019), “Pengembangan Kewirausahaan melalui Pemanfaatan Strategi Pemasaran yang Tepat” (2018), dan “Kebijakan Pembiayaan Perumahan Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)” (2016)).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
 ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.